



Peran Dinas Pariwisata Dalam Tata Kelola Dan Promosi Kawasan Pariwisata (Studi Kasus di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara)

M. Taufik Rachman¹, Baiq Reinelda Tri Yunarni², Teguh Dwiatma³

¹Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-02-2019

Disetujui: 15-02-2019

Kata Kunci:

1. Peran
2. Dinas
Pariwisata
3. Promosi Wisata
4. Lombok Utara

Keyword:

1. Role
2. Tourism Office
3. Tourism
Promotion
4. North Lombok

ABSTRAK

Abstrak: Strategi pengembangan promosi pariwisata banyak dilakukan oleh Negara berkembang adalah untuk memperkuat perekonomian nasional. Sektor industri pariwisata di yakini sebagai sektor dalam membangun perekonomian menuju kemajuan. Masalah bagaimana cara Dinas Pariwisata mengelola tempat-tempat wisata yang harus di pecahkan. Keberadaan Dinas Pariwisata di suatu wilayah tentu akan mempengaruhi ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja di tempat wisata dan masyarakat sekitarnya. Begitupun dengan keberadaan Dinas Pariwisata di Kecamatan Pemenang yang mampu membantu masyarakat yang ada di sekitar tempat usahanya dengan menyediakan lahan / space untuk kegiatan usaha anggota pokdarwis dan memberikan dana atau pelatihan bagi pokdarwis sesuai dengan bidang usaha yang di jalankan. Dengan demikian maka akan terlihat nyata pengaruh-pengaruh bagi tenaga kerja atau masyarakat jika sudah di temukan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang terserap oleh Dinas Pariwisata yang ada di kecamatan pemenang. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu daerah, maka peran Dinas Pariwisata sangat di perlukan dalam upaya ikut berpartisipasi membangun dan mengembangkan sektor pariwisata di daerah dan di tingkat nasional.

Abstract

The strategy of developing tourism promotion is much done by developing countries is to strengthen the national economy. The tourism industry sector is believed to be a sector in building the economy towards progress. The problem is how the Tourism Office manages tourist attractions that must be solved. The existence of the Office of Tourism in an area will certainly affect the economy by absorbing workers in tourist attractions and surrounding communities. Likewise with the existence of the Tourism Office in Pemenang Subdistrict which is able to help the community around its place of business by providing land / space for pokdarwis members' business activities and providing funds or training for pokdarwis in accordance with the business sector being run. Thus, there will be a significant influence on the workforce or the community if it has been found how much the workforce is absorbed by the Tourism Office in the winning sub-district. And to improve the welfare of the community in an area, the role of the Tourism Office is very much needed in an effort to participate in building and developing the tourism sector in the region and at the national level.

Latar Belakang

Perkembangan tata kelola kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara sudah semakin meningkat tetapi sebagian masyarakat masih asing mendengar tentang kawasan pariwisata. Oleh karena itu penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara atau lembaga dewan promosi daerah untuk terus memperkenalkan serta mempromosikan kawasan pariwisata kepada masyarakat luas maupun kepada wisatawan domestic dan mancanegara.

Kontribusi kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Utara juga dapat dilihat dari jumlah penerimaan yang di peroleh oleh pemerintah baik dari devisa maupun pajak, tidak hanya itu, kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Utara juga perlu melibatkan peran dewan promosi daerah dalam tata kelola kawasan pariwisata sehingga nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi tingkat pengangguran dengan pemanfaatan sumber daya manusia lokal sebagai tenaga kerja.

Promosi dan pengelolaan pariwisata merupakan salah satu upaya yang di lakukan masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan obyek wisata. Pengelolaan pariwisata yang ideal perlu memperhatikan misalnya terkait dengan adat istiadat atau budaya masyarakat di sekitar tujuan wisata. Untuk menciptakan tata kelola yang baik di perlukan dukungan pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan dunia atau sektor pariwisata. Masyarakat, wisatawan dan pemerintah daerah perlu saling terpadu untuk berupaya secara maksimal dalam mengembangkan kondisi tata kelola wisata yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu sektor yang dapat menguntungkan bagi pemerintah, sektor pariwisata harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait dengan persoalan promosi dan pengembangan pariwisata yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kondisi tersebut harus mampu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan promosi kepariwisataan di Indonesia, terutama daerah-

daerah pelosok yang masih belum terjangkau dan terjamah oleh tangan manusia, yang keasliannya masih sangat alami, biasanya wisatawan mancanegara lebih menyukai kondisi yang seperti itu, dari pada obyek wisata yang sudah terjamah oleh manusia. Banyaknya objek wisata yang masih belum dikenal oleh masyarakat luas, juga menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dalam rangka memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Masih minimnya tingkat promosi menjadi kendala pemerintah dalam memperkenalkan pariwisata lokal ke luar negeri, terutama objek wisata yang berada di daerah pelosok yang jauh dari ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Sebagai salah satu daerah otonom baru, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, harus lebih giat lagi dalam mempromosikan pariwisata lokal, karena potensi yang dimiliki oleh daerah ini, terutama disektor pariwisata tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi besar sehingga seharusnya pemerintah tanggap dengan kondisi daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di sector pariwisata, supaya pariwisata lokal, menjadi terangkat yang nantinya akan berimplikasi pada semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Maka dari permasalahan di atas peneliti tertarik mengetahui bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Tata Kelola dan Promosi Kawasan Pariwisata yang ada di Kecamatan Pemenang.

Tinjauan Pustaka

a. Administrasi Publik

Definisi Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana Sumber Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam Kebijakan Publik. Konsep

Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar yang mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public Administration” diganti menjadi Administrasi Negara. Jika ada para pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik, maka itu dapat dikatakan kesalahan berfikir, karena Administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).

Chandler & Plano dalam Pasolong (2012:55), menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan Seni dan Ilmu yang ditujukan untuk mengatur “Public Affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan Masalah Publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Menurut Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

George J. Gordo dalam Inu Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responabilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Beberapa definisi Administrasi Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

a. **Kondisi Pariwisata Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah**

Pembukaan Undang-Undang (UUD)

1945 memuat baik cita-cita dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara. Cita-cita pembentukan Negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yaitu

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung, pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara.

Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis *World Travel and Tourism Council* (WTTC) (2016) dan World Bank (2016), industri pariwisata di Indonesia telah menyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini dan diperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di atas rata-rata industri. Peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional, sebesar 9,3%. Pertumbuhan penerimaan devisa tertinggi, yaitu 13%. Biaya *marketing* hanya 2% dari proyeksi devisa. Penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan, atau 8,4%. Lapangan kerja tumbuh 30% dalam 5 tahun. Pencipta lapangan kerja termurah US\$ 5.000/satu pekerjaan.

Berdasarkan analisis tersebut wajar jika industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. Yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor-faktor yang secara faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan mendorong program pembangunan daerah.

Dalam orde reformasi ini, merupakan momentum awal yang sangat tepat bagi daerah untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemandirian daerah ini terwujud dalam pemberian kewenangan yang cukup besar meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Penyerahan kewenangan tersebut disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Merupakan konsekuensi logis bagi daerah dengan adanya penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang bersifat operasional dilimpahkan kepada daerah. Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk pembiayaan promosinya.

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber pendapatan asli daerah, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan industri pariwisata suatu daerah diperlukan strategi-strategi tertentu maupun kebijakan-kebijakan baru di bidang kepariwisataan. Sebuah gagasan menarik dari Sri Sultan HB X yang menyodorkan konsep kebijakan pariwisata borderless, yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata yang tidak hanya terpaku pada satu obyek untuk satu wilayah, sedangkan pola distribusinya harus makin dikembangkan dengan tidak melihat batas geografis wilayah.

b. Kebijakan Pemerintah

Pada dasarnya, setiap negara yang membangun dan mengembangkan kepariwisataan memerlukan suatu organisasi atau wadah yang dapat berfungsi membina kepariwisataan, baik secara nasional, regional maupun internasional, dalam bentuk organisasi pemerintah, semi pemerintah dan bukan pemerintah. Dalam pembentukan organisasi kepariwisataan diperlukan suatu kebijakan atau aturan yang mendasarinya,

sehingga dapat diakui secara nasional dan dapat melakukan kegiatan kerja sama secara nasional maupun internasional. Organisasi kepariwisataan adalah suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksana kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, yang secara langsung melakukan pengawasan dan memberi arahan dalam pengembangan kepariwisataan. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*). Bambang Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya *good tourism governance* akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai cirri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip : partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasikan aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan.

Di dalam organisasi yang bersifat internasional, diharapkan adanya kerja sama antar negara sehingga dapat memahami kepentingan dari masing-masing negara terutama dalam bidang kepariwisataan. Untuk itu, setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, regional maupun nasional. Di samping itu, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar negara secara bilateral atau multilateral, yang bertujuan memperbesar jumlah kunjungan wisatawan dan memperlancar arus wisatawan. Pada umumnya ada dua bentuk organisasi kepariwisataan yaitu organisasi kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah (*government tourist office*) dan organisasi kepariwisataan yang merupakan asosiasi-asosiasi dengan bermacam-macam kelompok perusahaan yang merupakan patner (rekanan) bagi *government tourist office*.

Berikut akan dijelaskan organisasi kepariwisataan yang berada dalam ruang lingkup nasional, regional dan internasional.

c. Tata Kelola Pariwisata

Menurut Beritelli et al., (2007) tata kelola adalah konsep yang mengacu pada hubungan antara berbagai stakeholders dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Hal itu terkait bagaimana para stakeholders menentukan, melaksanakan dan mengevaluasi aturan untuk interaksi para stakeholders, interaksi tersebut dapat pula disebut kolaborasi karena di dalamnya terdapat unsur kerja sama multi stakeholder atau multi organisasi. Pengembangan pariwisata tidak berhasil dengan baik tanpa dukungan (*support*) dari semua stakeholder pariwisatanya, khususnya pemerintah yang secara berkelanjutan, Awalnya dengan memberikan pengadaan fasilitas pendukung infrastruktur, sarana prasarana utama agar daya tarik wisatanya mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Memberikan bimbingan dan pendampingan secara kompeten (tata kelola pariwisata) sehingga masyarakat pengelola mampu bekerja profesional dalam mengelola obyek daya tarik wisata yang sesuai dengan yang diharapkan, serta pengawasan dan evaluasi secara simultan agar tidak terjadi kesalahan manajemen. Dalam aspek promosi setiap tahun diadakan program promosi terpadu seperti pengenalan wisata dengan Talk show; expo wisata; ke daerah lain yang potential agar setiap perubahan inovasi dan existensi obyek wisata yang ada dapat dipahami dan dikenal oleh masyarakat luas. Pengembangan melalui media komunikasi dan elektronik IT network, sangat diharapkan demi percepatan informasi kepada khalayak sasaran promosi wisata.

d. Peran Dinas Pariwisata

Menurut Pitana dan Gayatri (2005):95, mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan, fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan

oleh Dinas Pariwisata. Pemerintah harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan daerah, dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah peranan yang dapat diberikan oleh industri pariwisata.

1. Penyerapan tenaga kerja

Salah satu keuntungan pariwisata adalah menciptakan kesempatan kerja. Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian dapat menambah pemasukan/pendapatan masyarakat setempat dengan menjual barang dan jasa. Banyak individu menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain. Baik sektor pariwisata maupun sektor-sektor lain yang berhubungan dengan sektor pariwisata tidak dapat dipungkiri merupakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Industri pariwisata memberikan peluang kesempatan kerja, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, travel, dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut membutuhkan banyak sumberdaya manusia yang secara langsung bermuara pada penyerapan tenaga kerja.

2. Sumber pendapatan daerah

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak. Misalnya, pengenaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata hotel dan restoran tersebut. Sumber lain bisa berupa usaha pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah juga mengenakan pajak secara langsung kepada wisatawan jika mereka melakukan transaksi yang tergolong kena pajak. Biasanya dikenal sebagai *service tax*, yang umumnya sebesar 10% untuk transaksi di hotel dan restoran. Pajak ini berbeda dari pajak yang sumbernya dari keuntungan hotel dan restoran yang diberikan sebelumnya.

3. Sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan. Jumlah wisatawan yang banyak

merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan dapat memperoleh penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan di sektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata, pemandu wisata, dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan sumber pendapatan perorangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

e. Komponen-komponen Wisata

Analisis sistem pariwisata tidak terlepas dari segmen pasar pariwisata karena segmen pasar pariwisata merupakan spesifikasi bentuk dari pariwisata yang dapat berfungsi sebagai bentuk khusus pariwisata. Hal ini terkait dengan output akhir yang diharapkan oleh wisatawan yaitu kepuasan akan obyek wisata yang dihasilkan. Untuk mewujudkan sistem pariwisata yang diinginkan, maka diperlukan beberapa komponen pariwisata. Menurut Inskeep (1991:38), di berbagai macam literatur dimuat berbagai macam komponen wisata. Namun ada beberapa komponen wisata yang selalu ada dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata. Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek wisata.
- b. Akomodasi. Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.
- c. Fasilitas dan pelayanan wisata. Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk *tour and travel operations* (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya, restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-

toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi wisata, pelayanan pribadi (seperti salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum (termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran), dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai).

- d. Fasilitas dan pelayanan transportasi. Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara.
- e. Infrastruktur lain. Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, telex, faksimili, dan radio).
- f. Elemen kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan; menyusun strategi marketing dan program promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan penanaman modal bagi sektor publik dan swasta; mengendalikan program ekonomi, lingkungan, dan sosial kebudayaan.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2011:205), Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok

atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di kabupaten Lombok utara dengan melibatkan kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Secara Administratif Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 Kecamatan dan 33 desa dan 332 Dusun. Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah 80.953 Ha. Dan Penelitian ini di lakukan pada bulan desember 2018 sampe selesai.

c. Penentuan Informan

Peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dan *Snowball sampling* sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. Menurut Sugiono (2011:244), *Purposive sampling* adalah adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Menurut Sugiono (2011:245), *Snowball sampling* adalah teknik penentuan informan dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Informan penelitian adalah Kepala ruangan Panitra Mudah Perkara beserta pegawai, di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan masyarakat pengguna layanan pendaftaran dan pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang lebih memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena sifatnya masyarakat yang menjadi subjek.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak dijadikan informan penelitian. Para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah Kepala ruangan Panitra Mudah Perkara beserta pegawai, di

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan masyarakat pengguna layanan pendaftaran dan pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiono (2011:224), Pengamatan dilakukan untuk mencegah adanya keraguan pada peneliti, apakah data yang dijangkau terdapat kekeliruan atau bias. Pengamatan ini juga membantu penelitian pada saat teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. Teknik ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang terjadi antara pegawai dan masyarakat sebagai pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (2011:231), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan pengadilan pada pelayanan pendaftaran dan pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dilakukan oleh pegawai dan masyarakat.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen sangat penting untuk keperluan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan

mendorong. Dokumen juga sebagai bukti untuk suatu pengujian.

Menurut Sugiono (2011:240), Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana kondisi ruang pelayanan pengadilan, Tugas, struktur organisasi, jumlah pegawai, profil Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Menurut Sugiono (2011:247), Untuk itu perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah melakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Menurut Sugiono (2011:249), Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiono (2011:253), Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

g. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, peneliti akan menggunakan Teknik triangulasi data.

Teknik triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan informan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan

pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber.

Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain. Data dapat dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Tata Kelola Pariwisata

Sejak pemberlakuan otonomi daerah tahun 2010, kebijakan yang dirancang pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menghasilkan ketegangan atau tarik menarik antara kebijakan pemerintah yang menekankan pertumbuhan pendapatan dan padat modal di satu pihak, dan nilai masyarakat Lombok Utara yang memiliki pandangan tradisional kolektif di pihak lain, menekankan pada distribusi pendapatan dan usaha yang merata. Bersamaan dengan itu terjadi peminggiran (marginalisasi) sejumlah sektor ekonomi rakyat yang mengancam keberlanjutan ekonomi pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Ketegangan yang terjadi menjadikan peneliti untuk menarik kembali permasalahan tersebut pada diskursus konsep keadilan dalam tata kelola pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari tata kelola pariwisata di dalam masyarakat Lombok Utara, kemudian menganalisis akar filosofis prinsip-prinsip keadilan dalam tata kelola pariwisata dan implikasinya bagi kebijakan tata kelola ekonomi pariwisata.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, seluruh data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan, disistematisasikan, dan dianalisis sedemikian rupa berdasarkan pembahasan mengenai tata kelola ekonomi pariwisata Lombok Utara dan mempromosikan obyek wisata di Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan sejumlah prosedur dalam metodologi: Deskripsi, interpretasi, koherensi, heuristika dan melakukan idealisasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa tata kelola pariwisata pada masyarakat Lombok Utara dengan prinsip kapitalisme, menghasilkan

ketimpangan pendapatan, peminggiran pada beberapa sektor ekonomi dan ketidak kondusifan ekonomi pariwisata. Faktor utama dari ketimpangan dan ketidak kondusifan ekonomi pariwisata adalah belum terjadinya sinergitas antar pengambil kebijakan dan kedinian dalam melepas masyarakat untuk bersaing dalam konstelasi global. Kelemahan terhadap pengelolaan pariwisata kapitalistik yang dirasakan oleh beberapa jenis usaha pariwisata di Lombok Utara memunculkan peminggiran, dan konflik-konflik agraria. Namun jika mencoba menilik kembali mengenai konsep persaudaraan (*polong merenten*) masyarakat Lombok Utara, maka konsep Mohammad Hatta mengenai demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan berbentuk badan organisasi Koperasi Pariwisata adalah hal yang sesuai dengan nilai keadilan pada masyarakat.

Pengembangan dan pengelolaan wisata di Kabupaten Lombok Utara diarahkan pada penataan daya tarik wisata (destinasi), pembinaan wisata, peningkatan promosi wisata daerah dengan cara menjalin kemitraan, mengembangkan event-event lokal, tradisional, maupun internasional serta memanfaatkan teknologi informasi. Dengan dicanangkannya Kabupaten Lombok Utara sebagai “Destinasi Wisata Dunia”, pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara terus berupaya mengembangkan destinasi-destinasi yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara. Bidang seni juga dilestarikan di Kabupaten Lombok Utara, terbukti dengan banyaknya jumlah atraksi dan sanggar kesenian yang ada di masing-masing kecamatan.

a. Perinsip Dalam Pengelolaan Pariwisata.

1. Mengembangkan Kabupaten Lombok Utara sebagai destinasi pariwisata terpadu yang unik, kompetitif dan ramah lingkungan.
2. Mengembangkan produk wisata yang kompetitif sekaligus komplementer (dalam jenis, skala dan prioritas) dengan produk wisata yang dikembangkan pusat-pusat pariwisata regional Bali, NTB, NTT.
3. Pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Utara pada kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata.

b. Pembinaan Pokdarwis

1. Menciptakan kondisi yang dapat merangsang tumbuhnya kelompok-kelompok sadar wisata baru di setiap obyek wisata atau tempat-tempat lain yang banyak dikunjungi wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara.
2. Mendorong kelompok-kelompok sadar wisata yang telah dibentuk atau yang telah ada agar terus mengembangkan diri dan kegiatannya dalam upaya meningkatkan tugas, fungsi dan perannya dalam memajukan pariwisata di daerah.
3. Meningkatkan kualitas / peran kelompok yang telah ada.
4. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 13, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus atau anggota pengawas.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Faktor-Faktor Kunci

a. Visi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2018 adalah merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan, sekaligus merupakan penjabaran dari visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2010-2014. Salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Lombok Utara adalah peningkatan kesempatan kerja dan investasi di kabupaten Lombok Utara yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2014.

Adapun Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2018, adalah :

“Kabupaten Lombok Utara Menjadi Destinasi Wisata Berbasis Alam dan Budaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan sektor pariwisata memiliki makna “**SAPTA PESONA**”, yang berasal dari dua patah kata, yaitu “sapta” dan “pesona”. Sapta pesona ini dipahami sebagai 7 (tujuh) unsur yang terkandung dalam setiap produk pariwisata serta di pergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk

pariwisata. Yang termasuk ke dalam tujuh unsur produk pariwisata itu adalah : aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

1. **Berdaya saing**, bertumbuh kembangnya usaha-usaha ekonomi produktif pendukung pariwisata yang memiliki nilai keunggulan oleh sumber daya yang unggul dan memiliki ahlak mulia, kepedulian serta kesadaran lingkungan yang tinggi dalam penguasaan dan penerapan IPTEK.
2. **Berkelanjutan**, terjaganya keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya alam sebagai asset wisata lingkungannya dengan kualitas nilai serta keanekaragaman yang semakin meningkat.

b. Misi

Misi merupakan upaya untuk meraih visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau suatu cita-cita dan citra yang ingin di capai. Misi dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan.
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang unggul dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. Memperkuat kelembagaan pariwisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan.

c. Tujuan

1. Berkembangnya obyek dan daya tarik wisata serta sistem pemasaran yang berdaya saing global.
2. Melestarikan budaya daerah dan pemeliharaan potensi sumber daya pariwisata,
3. Meningkatkan kerjasama kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan.

d. Sasaran

1. Terciptanya obyek dan daya tarik wisata yang alami dan lestari, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sistem pemasaran yang berdaya saing.

2. Terwujudnya kelestarian budaya daerah dan terpeliharanya potensi sumber daya pariwisata.
3. Meningkatkan kerja sama kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan.

e. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

1. Mengoptimalkan komitmen seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk meningkatkan citra pariwisata dan budaya dalam upaya menjadi kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu daerah tujuan utama pariwisata yang sapta pesona.
2. Mengoptimalkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung serta penataan obyek dan daya Tarik wisata (ODTW) sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan.
3. Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan budaya daerah menjadi pesona seni budaya sebagai penunjang pariwisata.
5. Meningkatkan dukungan pemerintah dan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan pengembangan perencanaan teknis pariwisata dalam upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

3. Kebijakan Pemerintah Memajukan Pariwisata di Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.

Tidak bisa kita pungkiri, adanya kemajuan wisata di Lombok memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah semakin banyaknya peluang ekonomi tercipta dari dunia wisata, seperti maraknya *usaha rental mobil di Lombok*, munculnya *tour service di Lombok* serta makin majunya usaha kerajinan dan oleh-oleh khas Lombok. Diantara dampak negatifnya adalah

munculnya tempat hiburan malam serta muncul masyarakat yang semakin hedonis, jauh dari nilai agama.

Diluar plus minus tersebut, pemerintah aslinya memiliki peran penting memajukan dunia wisata di Lombok utara, factor kebijakan pemerintah :

- a. Membenahi fasilitas dan memperbaiki tempat wisata di pulau Lombok.
- b. Memfasilitasi akses menuju ke tempat wisata, baik pembukaan jalan raya baru, perbaikan jalan raya maupun persediaan alat transportasi umum.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Lombok tentang pentingnya pariwisata.
- d. Melakukan promosi tentang pariwisata di pulau Lombok baik kepada masyarakat propinsi Nusa Tenggara Barat maupun masyarakat Indonesia bahkan Internasional melalui acara, penelitian, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan tentang pariwisata.
- e. Memfasilitasi pembentukan komunitas Genpi (Generasi Pesona Indonesia) yang terdiri dari 25 komunitas yang berada di Nusa Tenggara Barat yang peduli terhadap pariwisata. (Sumber : News.detik.com, 21 September 2016).

4. Program-Program Kegiatan di Bidang Pariwisata Umumnya dan Meningkatkan Peran Serta Pokdarwis, Maka Aparat Pemerintah Hendaknya :

- a. **program-program kegiatan di bidang pariwisata :**
 1. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok sadar wisata (pokdarwis) baik berupa dana maupun pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pokdarwis.
 2. Memberikan lebih banyak perhatian dalam bentuk program-program monitoring dan evaluasi serta membantu melagalisasi keberadaan mereka dengan memberikan surat keputusan (SK) baik yang di buat oleh desa, Kecamatan/Kelurahan, Dinas Kebudayaan dan pariwisata maupun oleh bupati langsung secara bertahap sesuai dengan peran dan prestasi yang di raih.
 3. Memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok sadar wisata yang telah berjasa dan berprestasi dalam

mengembangkan kepariwisataan di daerah atau tempat pokdarwis tersebut berada.

4. Membantu menyediakan sekretariat bagi masing-masing kelompok sadar wisata sebagai tempat berkoordinasi dan sebagainya.

b. peran pokdarwis

Pokdarwis memiliki peran yang sangat penting untuk mengeksplorasi destinasi baru serta mempromosikannya, maka dari itu mereka membentuk forum komunikasi pokdarwis. Forum ini fungsinya mengakomodir seluruh keluhan maupun laporan kinerja pokdarwis di seluruh Lombok Utara. Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengandeng kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mempromosikan pariwisata. Jumlahnya mencapai 52 kelompok.

Simpulan

Pengembangan daerah pariwisata dikelola oleh SKPD melalui dinas pariwisata setempat. Beberapa regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata dalam pengembangan dan pengelolaan wisata di KLU adalah penataan daya tarik wisata (destinasi), pembinaan wisata, peningkatan promosi wisata daerah dengan cara menjalin kemitraan, mengembangkan event-event lokal, tradisional, maupun internasional serta memanfaatkan teknologi informasi. Dengan dicanangkannya Kabupaten Lombok Utara sebagai “Destinasi Wisata Dunia”, pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara terus berupaya mengembangkan destinasi-destinasi yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara.

Beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan perkembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Adanya event-event yang diselenggarakan Dinas Pariwisata seperti presean dan pekan apresiasi budaya (PAB) dan pameran-pameran tradisi.
2. Adanya promosi wisata oleh mahasiswa yang di luar daerah seperti adanya mahasiswa yang kuliah di jogja yang bernama Raden Wahyu dalam agenda promosi wisata budaya. Dia kuliah di jogja dengan mendapat beasiswa dari dines tersebut.
3. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) seperti adanya bantuan bagi

siswa yang ingin melanjutkan kuliah lebih tinggi dan di bantu oleh dinas tersebut

Sedangkan faktor penghambat pertumbuhan pariwisata di Lombok Utara adalah :

1. Kurangnya anggaran yang di jelaskan pada tahun 2018 lalu target PAD di patok 200 miliar justru di kurangi menjadi 145 miliar, hal tersebut tidak lepas dari bencana gempa bumi yang mengguncang daerah tersebut.
2. Minimnya sosialisasi terhadap daerah wisata di kabupaten Lombok utara seperti orang luar lebih banyak mengetahui tempat wisata yang ada di tiga gili tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa selain yang ada di sana masih banyak di tempat yang lain seperti pantai pandanan, pantai sira, pantai impos.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti di lihat dari kapal penyeberangannya masih banyak menggunakan standar dan belum menggunakan standar internasional seperti speedboat yang di gunakan lebih cepat dan lebih nyaman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran berikut :

1. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas maka, dalam rangka meningkatkan kinerja dinas pariwisata di kecamatan pemenang maka diharapkan proses peningkatan khususnya peningkatan usaha kepada masyarakat lebih di tingkatkan lagi supaya nantinya masyarakat khususnya di daerah tempat wisata mampu bersaing dalam usahanya baik di luar maupun di dalam daerah.
2. Dengan terserapnya tenaga kerja yang cukup banyak oleh dinas pariwisata maka, peran tenaga kerja harus mampu menciptakan atau membuat usaha sendiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang akan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Pertama dinas pariwisata harus memperkenalkan atau mempromosikan secara langsung kepada masyarakat bagaimana proses promosi pariwisata daerah yang sebenarnya, karena dengan begitu masyarakat setempat bisa melihat keberadaan dinas pariwisata tersebut.
4. Dinas pariwisata yang di kecamatan pemenang, masyarakat tentunya menjaga dan melestarikan sentra industri pariwisata tersebut supaya dinas pariwisata semakin maju dalam membangun kepariwisataan.

Daftar Pustaka

- [1] Anggraeni, Siska. 2014. Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya.
- [2] Awaludin, 2016. Pelaksanaan Kewenangan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Berdasarkan Undang-Undang No 10 Th 2009 Tentang Kepariwisatan (Studi Di Kabupaten Lombok Utara).
- [3] Beritelli, et, al, 2007. Stakeholder Analysis and Conflict Management.
- [4] Hans. Buchli, 1998. industry pariwisata.jakarta.PT. Perca
- [5] Inskeep, 1991. perencanaan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan pendekatan pengembangan. New York: Van Nostrand Reinhold.
- [6] K. Krapt, 1942. pengertian wisata. Jakarta: PT. Gramedia.
- [7] Marpaung, happy 2002. Pengetahuan pariwisata.
- [8] Pendit, 1990. pengetahuan Pariwisata.
- [9] Permatasari, SI, 2017. Peran Badan Promosi Pariwisata Indonesia Surakarta (BPPIS) dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kota Surakarta
- [10] Pitana, Gayatri 2005. Sosiologi pariwisata.
- [11] Putri,R.M, 2017. Perencanaan Lanskap Pengembangan Kawasan Agroporestri Pekon Sukoharjo-Kabupaten Pringsewu menjadi Obyek Destinasi Wisata.
- [12] Salma,I,A. dan Susilowati,I, 2004. Analisis permintaan objek wisata alam curugsewu, kabupaten Kendal dengan pendekatan travel cost.
- [13] Santoso, Heri. 2015. Peranan Dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara.
- [14] Sapulette,A, 2015. pengaruh biaya promosi darwin ambon yacht race terhadap jumlah kunjungan wisatawan luar negeri di kota ambon. Politeknik Negeri Ambon.
- [15] Schulalard, v, herman, 1910. pengertian pariwisata.
- [16] Singal,Y,I,M, 2016. Analisi expectation gap antara aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dan pemangku kepentingan mengenai peran dan independensi apip dalam pengawasan penyusunan anggaran belanja daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi utara.
- [17] Sunaryo, Bambang, 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.
- [18] Swena, ketut, I, 2017. pengetahuan dasar ilmu pariwisata.
- [19] Taan, Hapsawati, 2016. Peran Promosi dan Tata Kelola Religi Bongo dalam Meningkatkan Daya Saing Paiwisata di Kabupaten Gorontalo.
- [20] Unga, ode la, kartini, 2011.Strategi pengembangan kawasan wisata kepulauan banda.
- [21] Utaminingsih,S, 2012. Model manajemen pengembangan soft skill smk program keahlian pariwisata.
- [22] Wahab, Salah, 2003. manajemen kepariwisataan. Jakarta: pradnya paramita.
- [23] Yoeti, 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata.Jakarta: PT. Perca.
- [24] Yudiyanti, Yeti, 2014. **Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat.**

Artikel/Modul/Diklat

- [25] E,Guyer, Freuler, handbuch del weizerischen volkswirtschaft.
- [26] Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kepres 22 Tahun 2011, Kemenpan No 69 Tahun 2010 tersebut merupakan usaha dan ikhtiar pemerintah pusat dalam rangka membuka peluang sector pawisata nasional dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.